

Judul : BUMN Makin Ramping, Makin Sehat?
Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 1 & 2



BUMN Makin Ramping, Makin Sehat?

((dari Hal 1

BUMN lain yang disebut-sebut akan mengalami nasib serupa adalah PT PLN Batu bara, PT Kertas Leces (Persero), Merpati Nusantara Airlines, dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (PANND). Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, langkah tersebut sebagai upaya memberikan kepastian hukum, menuntaskan permasalahan yang selama ini belum terselesaikan, dan solusi terbaik untuk negara.

Perusahaan pelat merah yang dibubarkan merupakan yang sudah tidak sehat, tidak beroperasi, dan tidak berkontribusi terhadap negara. Proses pembubaran ini akan dilakukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) selaku pemegang surat kuasa khusus (SKK).

Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi mengatakan pihaknya telah melakukan kajian komprehensif untuk merumuskan strategi penyelesaian terbaik terhadap tiap BUMN tipe pengelola.

"Tahapan restrukturisasi yang kami lakukan sangat memperhatikan berbagai aspek, yaitu hukum, sosial, bisnis, dan keuangan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam proses pembubaran ketiga BUMN ini, PPA juga telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis (17/3).

Sekretaris Perusahaan PPA Agus Widjajana menerangkan alasan pembubaran tiga perusahaan BUMN tersebut. Sebelum sampai pembubaran, PPA sudah mencoba mencari investor untuk PT KKA dan memberikan dana talangan. Namun KKA tetap tidak dilirik oleh investor karena teknologi mesin-mesin yang dimiliki sudah ketinggalan. Belum lagi KKA memiliki utang sekitar Rp2 triliun.

"Kalau misalnya (ada) investor melakukan revitalisasi mesin itu biayanya besar. Hampir samakayak pabrik baru. Dia juga harus menanggung utang. Kan enggak menarik jadinya. Kalau misalnya kami yang melakukan revitalisasi, nilai ekonomis enggak bagus juga," kata dia kepada *KORAN SINDO* tadi malam.

Dengan kondisi seperti itu, menurut dia, negara malah akan dirugikan. Dia mengakui selama ini di KKA misalnya, perusahaan itu punya pembangkit listrik sendiri yang bisa menghidupi. Hanya saja penjualan lis-

triknya hanya bisa untuk meng-gajikaryawan yang sebagian besar tenaga pengamananan.

Kondisi serupa terjadi pada PT Iglas dan ISN. Iglas sudah memproduksi botol kaca hijau. Bisnis ini tergerus dengan masifnya penggunaan botol plastik. Pada 2020, ekuitasnya negatif Rp1,32 triliun. PT ISN pun sama, sudah tidak bisa menjalankan bisnis sebagai perusahaan pemintalan dan tekstil.

"Hanya maklud atau sebagai penjahit saja. Itu pun negatif. Pada 2020, negatifynya Rp86,2 miliar. Jadi (proses pembubaran perusahaan-perusahaan BUMN tidak sehat) enggak bisa cepat (karena) kita harus melakukan berbagai kajian dari segi bisnis, terutama dampak sosial terhadap karyawan dan masyarakat harus diperhatikan. Sudah tidak dampak sosial, khususnya ekonomi sudah tidak memberikan kontribusi," papar Agus.

Proses pembubaran ini telah dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), tetapi akan berlaku efektif ketika peraturan pemerintah (PP) tentang pembubaran ini sudah diterbitkan. Targetnya PP ini sudah selesai Juni nanti. Agus menuturkan setelah itu akan ada tim likuidator untuk memverifikasi aset dan para kreditur.

"Nanti akan dilakukan pelepasan aset oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Tinggal diberikan hak-haknya kepada kreditur preferen, separatis, dan konkuren. Hak-hak karyawan PT Iglas sudah beres semua. Terus untuk KKA itu nanti akan ada semacam talangan untuk membayar terlebih dahulu hak karyawan. ISN ini sedang ada proses pelepasan asetnya di Grati (Gresik). Itu salah satunya untuk bayar pesangon," sebutnya.

Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy menilai langkah Menteri BUMN Erick Thohir untuk mempercepat pembubaran sejumlah perusahaan BUMN yang dianggap tidak efisien dan menjadi beban keuangan negara sudah tepat.

Hal ini karena yang lebih dibutuhkan adalah perusahaan-perusahaan BUMN yang mampu bersaing tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. "Saat ini yang kita butuhkan itu bukan BUMN yang banyak, tetapi BUMN yang kuat, kokoh, punya daya saing, dan efisien. Itu yang kita butuhkan saat ini," tuturnya.

Bagi perusahaan pelat merah yang sudah tidak efisien dan

hanya menjadi beban, menurutnya, sudah seharusnya segera diputuskan nasibnya agar tidak lagi menggerogoti keuangan negara. "Untuk mengarah ke sana semua BUMN yang memang sudah tidak ada untung atau merugi, daripada menjadi beban negara memang sudah seharusnya dibubarkan," ungkapnya.

Langkah pembubaran sejumlah BUMN yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir diperkirakan terus berlanjut. Erick bahkan berencana kembali memangkas jumlah BUMN dari 41 perusahaan menjadi 37 perusahaan dalam rentang waktu dua tahun ke depan.

Yusuf melihat hal itu diupayakan untuk memudahkan pengawasan pemerintah dan sinergi antar-BUMN dan lebih fokus ke inti bisnis masing-masing.

Kendati demikian, kata dia, Kementerian BUMN harus memiliki justifikasi yang jelas dalam penugasan kepada perusahaan karena banyak BUMN yang masih menjalankan kewajiban pelayanan publik (PSO).

Pengamat BUMN dari Universitas Haluole Kendari Syamsul Anam menilai pembubaran perusahaan BUMN yang merugi menjadi kebijakan ideal yang dilakukan pemerintah. Pengurangan sejumlah perusahaan BUMN akan lebih memudahkan kementerian dalam mengawasi kinerja perusahaan. "Ke depan tentunya kerja BUMN memiliki daya saing yang lebih kuat walaupun hanya sedikit," katanya.

Setidaknya menurut Syamsul di masa depan idealnya BUMN yang dipertahankan pemerintah adalah BUMN yang memiliki produk dan jasa yang dibutuhkan oleh publik. Perusahaan-perusahaan tersebut harus memiliki tingkat kesehatan yang relatif baik dan memiliki daya saing yang kuat.

Sementara itu anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir untuk membubarkan tiga BUMN yang sudah tidak sehat sebagai langkah tepat. Karena yang dibubarkan adalah BUMN yang memang sudah lama tidak beroperasi.

"Ini langkah yang tepat karena BUMN itu memang sudah lama tidak beroperasi sehingga tidak ada pendapatan lagi, apalagi terus-menerus rugi dan menjadi beban negara," katanya.

□ *fwbahtiar/
aprilias andyna/
sabir laluhu/
rratnapurnama/
sindonews*